

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat

Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik.

SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan baik, instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas bidang tugas yang dipikul oleh suatu Badan Layanan Umum (BLU). SKPD bertanggung jawab dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas sekretaris daerah, dinas daerah dan lembaga teknis daerah, kecamatan, polisi dan pamong praja sesuai kebutuhan daerahnya. Dasar hukum yang berlaku sejak 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Gubernur dan wakilnya, Bupati dan wakilnya, atau Wali kota dan wakilnya tidak termasuk ke dalam satuan ini, karena berstatus sebagai Kepala Daerah. Ke dalam SKPD termasuk Sekretariat Daerah, Staf-staf Ahli, Sekretariat DPRD, Dinas-dinas, Badan-badan, Inspektorat Daerah, lembaga-lembaga daerah lain yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, Kecamatan-kecamatan (atau satuan lainnya yang setingkat), dan Kelurahan/Desa (atau satuan lainnya yang setingkat).

Tabel 4.1.**Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus**

No.	Nama Instansi
1.	Dinas Perhubungan
2.	Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.	Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang (PUPR)
5.	Dinas Tenaga Kerja, Industri, Energi, Perdagangan dan Usaha Kecil dan Menengah
6.	Dinas Pertanian dan Pangan
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AP2KB)
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
9.	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
10.	Dinas Kesehatan

4.1.2. Gambaran Umum Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dengan menggunakan kuisioner yang dibagikan kepada para pegawai negeri sipil di seluruh SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kudus. Pengumpulan data dilakukan pada saat jam kerja berlangsung pada Minggu pertama bulan Noember sampai dengan minggu terakhir Desember tahun 2019 di setiap SKPD yang berjumlah 10 instansi.

Sebelum dilakukan penyebaran kuesioner di setiap instansi, peneliti mengajukan ijin penelitian ke KESBANGPOL atau Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik pada bulan ke empat bulan Oktober 2019. Untuk mendapatkan ijin penelitian, peneliti harus menyerahkan proposal penelitian dan surat pengantar dari universitas kepada instansi KESBANGPOL. Dalam pengumpulan data, kuisioner diberikan kepada bagian Humas setiap instansi terlebih dahulu kemudian kuesioner dibagikan kepada sepuluh pegawai instansi bagian keuangan secara acak. Penyebaran kuesioner dilakukan kepada 100 responden, dari 100 responden yang mengisi kuesioner terdapat 15 kuesioner yang tidak kembali.

4.2. Deskripsi Responden

4.2.1. Jenis Kelamin Responden

Gambaran tentang jenis kelamin responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Perempuan	45	52,94 %
Laki-Laki	40	47,06 %
Jumlah	85	100 %

Sumber : Data primer yang diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.2. dapat diketahui bahwa dari 85 responden yang dijadikan sampel, 45 atau 52,94% adalah berjenis kelamin perempuan dan 40 atau 47,06% berjenis laki-laki.

4.2.2. Usia Responden

Berikut ini pada tabel 4.3. akan ditampilkan usia responden.

Tabel 4.3.
Usia Responden

Usia	Frekuensi	Persentase
25 - 35 tahun	23	27,06 %
36 - 45 tahun	51	60,00 %
> 45 tahun	11	12,94 %
Jumlah	85	100 %

Sumber : Data primer yang diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.3. di atas dapat dilihat bahwa usia responden didominasi usia antara 26 – 45 tahun dengan persentase sebesar 60 %.

4.3. Uji Kualitas Data

4.3.1. Uji Validitas

Uji Validitas merupakan sejauh mana suatu alat ukur itu menunjukkan ketepatan dan kesesuaian. instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Tingkat validitas dapat diukur dengan cara membandingkan nilai hitung r (*correlation item total correlation*) dengan nilai tabel r dengan ketentuan untuk *degree of freedom* (df) = $n-k$, dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah jumlah variabel independen.

Bila $r_{hitung} > r_{tabel}$, berarti pernyataan tersebut dinyatakan valid. $r_{hitung} < r_{tabel}$, berarti pernyataan tersebut dinyatakan tidak valid.

Tabel 4.4.
Hasil Uji Validitas

Variabel	Indikator	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran (X_1)	KSA.1	0,567	0,2133	Valid
	KSA.2	0,632	0,2133	Valid
	KSA.3	0,667	0,2133	Valid
	KSA.4	0,580	0,2133	Valid
	KSA.5	0,727	0,2133	Valid
	KSA.6	0,576	0,2133	Valid
	KSA.7	0,646	0,2133	Valid
Kesulitan Sasaran Anggaran (X_2)	KESA.1	0,768	0,2133	Valid
	KESA.2	0,739	0,2133	Valid
	KESA.3	0,747	0,2133	Valid
	KESA.4	0,743	0,2133	Valid
Pengendalian Akuntansi (X_3)	PA.1	0,566	0,2133	Valid
	PA.2	0,733	0,2133	Valid
	PA.3	0,521	0,2133	Valid
	PA.4	0,482	0,2133	Valid
	PA.5	0,665	0,2133	Valid
	PA.6	0,558	0,2133	Valid
	PA.7	0,569	0,2133	Valid
	PA.8	0,612	0,2133	Valid
	PA.9	0,675	0,2133	Valid
	PA.10	0,624	0,2133	Valid
Sistem Pelaporan (X_4)	SP.1	0,605	0,2133	Valid
	SP.2	0,839	0,2133	Valid
	SP.3	0,627	0,2133	Valid
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	AKK.1	0,253	0,2133	Valid
	AKK.2	0,225	0,2133	Valid
	AKK.3	0,221	0,2133	Valid
	AKK.4	0,221	0,2133	Valid
	AKK.5	0,222	0,2133	Valid
	AKK.6	0,227	0,2133	Valid
	AKK.7	0,222	0,2133	Valid
	AKK.8	0,225	0,2133	Valid
	AKK.9	0,253	0,2133	Valid
	AKK.10	0,239	0,2133	Valid
	AKK.11	0,222	0,2133	Valid
	AKK.12	0,249	0,2133	Valid
	AKK.13	0,220	0,2133	Valid
	AKK.14	0,257	0,2133	Valid

Sumber : data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.4. dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan untuk variabel kejelasan sasaran anggaran, kesulitan sasaran anggaran, pengendalian

akuntansi, sistem pelaporan, dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dikatakan valid. Karena pada tabel 3.3. menyatakan bahwa seluruh nilai r_{hitung} (*pearson correlation*) $> r_{tabel}$. Untuk nilai r_{tabel} didapatkan rumus $df = 83$ ($df = 85-2$). Berdasarkan nilai df tersebut maka diperoleh r_{tabel} sebesar 0,2133. Seluruh pertanyaan memiliki nilai *pearson correlation* $> 0,2133$. Maka kesimpulan dari tabel 4.3. adalah semua pertanyaan dikatakan valid karena (*pearson correlation*) $r_{hitung} > r_{tabel}$

4.3.2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika masing-masing pertanyaan dijawab responden secara konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner dikatakan handal jika nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,700.

Tabel 4.5.
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Angkat Standar Reliabel	Keterangan
Kejelasan Sasaran Anggaran	0,742	0,700	Reliabel
Kesulitan Sasaran Anggaran	0,738	0,700	Reliabel
Pengendalian Akuntansi	0,801	0,700	Reliabel
Sistem Pelaporan	0,763	0,700	Reliabel

Sumber : data primer diolah 2019

Hasil uji Reliabilitas pada tabel 4.5. di atas menunjukkan bahwa *cronbach Alpha* variabel pendidikan, disiplin kerja, ketrampilan, sikap dan etika, dan lingkungan kerja menunjukkan nilai lebih dari 0,700. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa semua variabel reliabel dan layak untuk dilakukan pengujian selanjutnya.

4.4. Deskripsi Variabel

4.4.1. Deskriptif Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran

Berdasarkan uji statistik deskriptif variabel kejelasan sasaran anggaran dihasilkan tabel di bawah ini :

Tabel 4.6.
Deskripsi Jawaban Responden Atas Kejelasan Sasaran Anggaran

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KSA.1	85	1	5	4,29	1,010
KSA.2	85	1	5	3,91	1,042
KSA.3	85	1	5	4,12	,944
KSA.4	85	2	5	3,98	,976
KSA.5	85	2	5	4,11	1,035
KSA.6	85	2	5	4,14	1,048
KSA.7	85	1	5	4,26	,875
Valid N (listwise)	85				

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, menyatakan bahwa jawaban responden pada item pertanyaan kuesioner kejelasan sasaran anggaran pada no. 1 menghasilkan rerata jawaban sebesar 4,29 yang berarti pegawai sangat setuju bahwa mereka persis apa yang harus dilakukan pada pekerjaan. Pada item pertanyaan no. 2 menghasilkan rerata jawaban sebesar 3,91 yang berarti pegawai setuju bahwa mereka memiliki sasaran yang jelas dalam melakukan pekerjaan.

Pada item pertanyaan nomor 3 menghasilkan rerata jawaban sebesar 4,12 yang berarti pegawai sangat setuju bahwa mereka memahami bagaimana pengukuran kinerja. Pada item pertanyaan nomor 4 menghasilkan rerata jawaban

sebesar 3,98 yang berarti pegawai setuju mengenai sasaaran dalam pekerjaan cukup menantang namun masih dalam konteks layak. Pada item pertanyaan nomor 5 menghasilkan rerata jawaban sebesar 4,11 yang berarti pegawai sangat setuju bahwa mereka memahami prioritas sasaran kerja.

Pada item pertanyaan nomor 6 menghasilkan rerata jawaban sebesar 4,14 yang berarti pegawai sangat setuju bahwa mereka memiliki *team work* yang baik guna menuju sasaran. Pada item pertanyaan nomor 7 menghasilkan rerata jawaban sebesar 4,26 yang berarti pegawai sangat setuju bahwa mereka memahami bagaimana pengukuran kinerja.

4.4.2. Deskriptif Variabel Kesulitan Sasaran Anggaran

Berdasarkan uji statistik deskriptif variabel kesulitann sasaran anggaran dihasilkan tabel di bawah ini :

Tabel 4.7.
Deskripsi Jawaban Responden Atas Kesulitan Sasaran Anggaran

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KESA.1	85	1	5	4,02	1,012
KESA.2	85	1	5	3,91	1,054
KESA.3	85	2	5	3,76	1,076
KESA.4	85	0	5	3,86	1,114
Valid N (listwise)	85				

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, menyatakan bahwa jawaban responden pada item pertanyaan kuesioner kesulitan sasaran anggaran pada nomor 1 menghasilkan rerata jawaban sebesar 4,02 yang berarti pegawai sangat setuju bahwa anggaran

yang diajukan sangat mungkin untuk dicapai. Pada item pertanyaan nomor 2 menghasilkan rerata jawaban sebesar 3,91.

Yang berarti pegawai setuju bahwa organisasi memiliki dia tingkatan standar anggaran. Pada item pertanyaan nomo 3 menghasilkan rerata jawaban sebesar 3,76 yang berarti pegawai setuju bahwa pada satu keadaan tertentu organisasi bersedia menerima kelonggaran anggaran hingga nilai dianggap wajar. Pada item pertanyaan nomor 4 menghasilkan rerata jawaban sebesar 3,86 yang berarti pegawai setuju bahwa kelonggaran anggaran baik untuk melakukan kegiatan yang tidak dapat dibuktikan secara resmi.

4.4.3. Deskriptif Variabel Pengendalian Akuntansi

Berdasarkan uji statistik deskriptif variabel pengendalian akuntansi dihasilkan tabel di bawah ini :

Tabel 4.8.
Deskripsi Jawaban Responden Atas Pengendalian Akuntansi

Descriptive Statistics					
	N	Minimu m	Maximum	Mean	Std. Deviation
PA.1	85	3	5	4,40	,561
PA.2	85	2	5	4,12	,931
PA.3	85	2	5	4,38	,801
PA.4	85	2	5	4,07	,842
PA.5	85	2	5	4,16	,898
PA.6	85	2	5	4,24	,921
PA.7	85	3	5	4,45	,664
PA.8	85	2	5	4,44	,879
PA.9	85	1	5	4,26	,953
PA.10	85	2	5	4,42	,762
Valid N (listwise)	85				

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, menyatakan bahwa jawaban responden pada item pertanyaan kuesioner pengendalian akuntansi pada nomor 1 menghasilkan rerata jawaban sebesar 4,40 yang berarti pegawai sangat setuju bahwa telah melakukan sistem akuntansi sesuai prosedur penerimaan kas.

Pada item pertanyaan nomor 2 menghasilkan rerata jawaban sebesar 4,12 yang berarti pegawai sangat setuju bahwa telah melakukan sistem akuntansi sesuai prosedur pengeluaran kas. Pada item pertanyaan nomor 3 menghasilkan rerata jawaban sebesar 4,38 yang berarti pegawai sangat setuju bahwa telah melakukan sistem akuntansi sesuai prosedur akuntansi aset. Pada item pertanyaan nomor 4 menghasilkan rerata jawaban sebesar 4,07 yang berarti pegawai sangat setuju bahwa telah melakukan sistem akuntansi sesuai prosedur akuntansi selain kas.

Pada item pertanyaan nomor 5 menghasilkan rerata jawaban sebesar 4,16 yang berarti pegawai sangat setuju bahwa transaksi tidak dapat dilakukan tanpa adanya otorisasi dari pihak yang berwenang. Pada item pertanyaan nomor 6 menghasilkan rerata jawaban sebesar 4,24 yang berarti pegawai sangat setuju bahwa *chart of account* pemerintah daerah tersedia dan telah digunakan. Pada item pertanyaan nomor 7 menghasilkan rerata jawaban sebesar 4,45 yang berarti pegawai sangat setuju bahwa transaksi yang terjadi harus didukung bukti transaksi yang valid dan sah.

Pada item pertanyaan nomor 8 menghasilkan rerata jawaban sebesar 4,44 yang berarti pegawai sangat setuju bahwa transaksi selalu dicatat dalam buku catatan akuntansi. Pada item pertanyaan nomor 9 menghasilkan rerata jawaban

sebesar 4,26 yang berarti pegawai sangat setuju bahwa pencatatan transaksi akuntansi harus selalu diperbaharui. Pada item pertanyaan nomor 10 menghasilkan rerata jawaban sebesar 4,42 yang berarti pegawai sangat setuju bahwa laporan keruanga ditinjau dan disetujui terlebih dahulu sebelum data didistribusikan.

4.4.4. Deskriptif Variabel Sistem Pelaporan

Berdasarkan uji statistik deskriptif variabel sistem pelaporan dihasilkan tabel di bawah ini :

Tabel 4.9.
Deskripsi Jawaban Responden Atas Sistem Pelaporan

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SP.1	85	4	5	4,26	,441
SP.2	85	3	5	4,08	,517
SP.3	85	3	5	4,05	,342
Valid N (listwise)	85				

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, menyatakan bahwa jawaban responden pada item pertanyaan kuesioner sistem pelaporan pada nomor 1 menghasilkan rerata jawaban sebesar 4,26 yang berarti pegawai sangat setuju bahwa kepala bagian keuangan, program, dan evaluasi melakukan pemeriksaan guna memastikan tidak terjadi adanya varians antara realisasi dan anggaran.

Pada item pertanyaan nomor 2 menghasilkan rerata jawaban sebesar 4,08 yang berarti pegawai sangat setuju bahwa responden mengerti tindakan yang diambil untuk mengoreksi penyimpangan yang tidak menguntungkan. Pada item pertanyaan nomor 3 menghasilkan rerata jawaban sebesar 4,05 yang berarti

pegawai sangat setuju bahwa reponden memiliki batas waktu agar tindakan koreksi lebih efektif.

4.4.5. Deskriptif Variabel Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan uji statistik deskriptif variabel akuntabilitas kinerja dihasilkan tabel di bawah ini :

Tabel 4.10.
Deskripsi Jawaban Responden Atas Akuntabilitas Kinerja

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AKK.1	85	1	5	3,61	1,092
AKK.2	85	1	5	3,48	1,201
AKK.3	85	1	5	3,25	1,234
AKK.4	85	1	5	3,81	1,160
AKK.5	85	1	5	3,28	1,324
AKK.6	85	1	5	3,22	1,322
AKK.7	85	1	5	3,32	1,136
AKK.8	85	1	5	3,45	1,220
AKK.9	85	1	5	3,52	1,076
AKK.10	85	1	5	3,55	1,118
AKK.11	85	1	5	3,29	1,100
AKK.12	85	1	5	3,34	1,140
AKK.13	85	1	5	3,19	1,286
AKK.14	85	1	5	3,48	1,161
Valid N (listwise)	85				

Sumber : Data primer yang diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, menyatakan bahwa jawaban responden pada item pertanyaan kuesioner akuntabilitas kinerja pada nomor 1 menghasilkan rerata jawaban sebesar 3,61 yang berarti pegawai setuju bahwa penggunaan dana anggaran berlandaskan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Pada item pertanyaan nomor 2 menghasilkan rerata jawaban sebesar 3,48 yang berarti

pegawai setuju bahwa audit kepatuhan dilakukan agar setiap penggunaan dana dilandasi peraturan dan hukum yang berlaku. Pada item pertanyaan nomor 3 menghasilkan rerata jawaban sebesar 3,25. Yang berarti pegawai setuju bahwa responden mampu mempertanggungjawabkan atas pengelolaan keuangan secara ekonomis dan efisien.

Pada item pertanyaan nomor 4 menghasilkan rerata jawaban sebesar 3,81 yang berarti pegawai setuju bahwa anggaran yang disusulkan mencerminkan visi, misi, tujuan, sasaran, dan hasil yang ditetapkan. Pada item pertanyaan nomor 5 menghasilkan rerata jawaban sebesar 3,28 yang berarti pegawai setuju bahwa responden mampu mempertanggungjawabkan atas penyusunan laporan kinerjanya. Pada item pertanyaan nomor 6 menghasilkan rerata jawaban sebesar 3,22 yang berarti pegawai setuju bahwa pengalokasian dana anggaran mengikuti proses dan prosedur yang berlaku. Pada item pertanyaan nomor 7 menghasilkan rerata jawaban sebesar 3,32 yang berarti pegawai setuju bahwa responden melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja selama satu periode.

Pada item pertanyaan nomor 8 menghasilkan rerata jawaban sebesar 3,45 yang berarti pegawai setuju bahwa program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi bahwa dana masyarakat menghasilkan output yang maksimal. Pada item pertanyaan nomor 9 menghasilkan rerata jawaban sebesar 3,52 yang berarti pegawai setuju bahwa program-program anggaran dirancang dengan mempertimbangkan prinsip efektifitas bahwa penggunaan

anggaran mencapai target atau tujuan kepentingan publik. Pada item pertanyaan nomor 10 menghasilkan rerata jawaban sebesar 3,55 yang berarti pegawai setuju bahwa pelaksanaan program APBD benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Pada item pertanyaan nomor 11 menghasilkan rerata jawaban sebesar 3,29 yang berarti pegawai setuju bahwa responden menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan program. Pada item pertanyaan nomor 12 menghasilkan rerata jawaban sebesar 3,34 yang berarti pegawai setuju bahwa anggaran yang dirancang dan ditetapkan pemerintah bersama DPRD sesuai dengan realisasinya bagi kepentingan publik. Pada item pertanyaan nomor 13 menghasilkan rerata jawaban sebesar 3,19 yang berarti pegawai setuju bahwa LAKIP digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan program/kegiatan selanjutnya dan diterbitkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada item pertanyaan nomor 14 menghasilkan rerata jawaban sebesar 3,48 yang berarti pegawai setuju bahwa responden mampu mempertanggungjawabkan atas penetapan tujuan kebijakan yang memperhatikan kepentingan organisasi dan kebutuhan publik.

4.5. Analisa Data

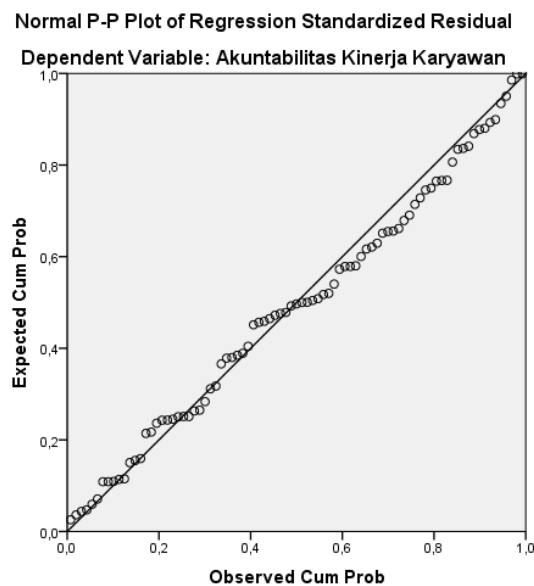
4.5.1. Uji Asumsi Klasik

4.5.1.1. Uji Normalitas

Untuk menghindari terjadinya bias, data yang digunakan harus berdistribusi normal. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

model regresi variabel-variabel independen yang mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal (Ghozali, 2016). Salah satu cara untuk melihat uji normalitas adalah dengan melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi normal. Metode yang handal untuk melihat analisis grafik adalah dengan melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya, dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Di bawah ini merupakan hasil pengujian normalitas dengan *normal probability plot* :

Gambar 4.1.
Normal P-Plot



Sumber : Data primer diolah 2019

Dari gambar 4.1. menunjukkan bahwa *plotting* data tidak jauh dari garis diagonalnya dan menempel pada garis diagonal. Hal ini berarti bahwa data terdistribusi normal.

Selain dengan *normal probability plot*, pendektasian normalitas dapat dilakukan dengan uji statistik. Untuk menguji normalitas residual dilakukan dengan uji statistik *non parametric kolmogorof-Smirnov* (K-S) dengan level signifikansi $> 0,05$. Dalam uji *kolmogorof-Smirnov* akan diuji normalitas variabel. Di bawah ini hasil uji normalitas residual.

Tabel 4.11.
Hasil Uji NPar Test Kolmogorov-Smirnov
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		85
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	1,96692219
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,064
	Positive	,064
	Negative	-,050
Test Statistic		,064
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

Sumber : Data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.8. hasil uji *Kolmogorov-Smirnov* menunjukkan bahwa nilai Asymp Sig. = 0,200 $> 0,05$. Hal ini menunjukkan bahwa data residual terdistribusi dengan normal.

4.5.1.2. Uji Multikolonieritas

Untuk mendeteksi adanya multikolonieritas di dalam regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF).

Tolerance mengukur variabel bebas yang tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jika $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi gejala multikolonieritas (Ghozali, 2016).

Tabel 4.12.
Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Kejelasan Sasaran Anggaran	,318	3,146
	Kesulitan Sasaran Anggaran	,343	2,919
	Pengendalian Akuntansi	,275	3,632
	Sistem Pelaporan	,806	1,241

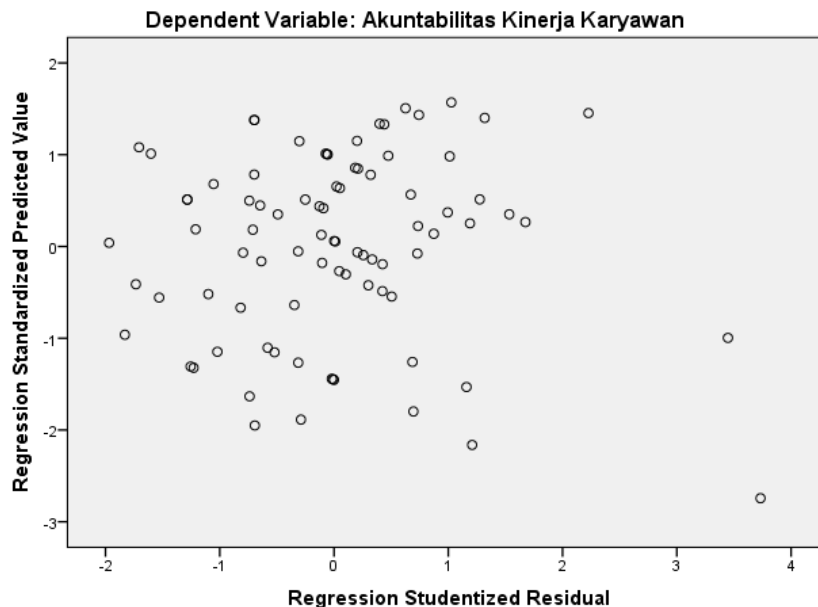
Sumber : Data primer diolah 2019

Dari tabel 4.6. di atas terlihat setiap variabel bebas mempunyai nilai *tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 . Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antara variabel bebas dalam model regresi ini.

4.5.1.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Pengujian terhadap heterokedastisitas dapat dilakukan melalui pengamatan terhadap grafik plot. Apabila grafik plot membentuk pola tertentu, maka model regresi memiliki gejala heteroskedastisitas, sedangkan apabila titik-titik tersebar tidak teratur dan berada di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu vertikal menunjukkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Gambar 4.2.
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Scatterplot



Sumber : Data primer diolah 2019

Pada grafik *scatterpot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi ini.

Selain menggunakan *scatterplot*, uji heteroskedastisitas dapat diuji melalui uji glejser. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai *absolute* residualnya (Gujarati, 2003). Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai *absolut* residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan *absolut* residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Adapun hasil uji heteroskedastisitas dengan glejser adalah sebagai berikut :

Tabel 4.13.
Hasil Uji Heteroskedastisitas dengan Glejser

Model	Sig,
1 (Constant)	,375
Kejelasan Sasaran Anggaran	,488
Kesulitan Sasaran Anggaran	,218
Pengendalian Akuntansi	,999
Sistem Pelaporan	,702

Sumber : data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki signifikansi $0,488 > 0,05$, sedangkan variabel kesulitan sasaran anggaran memiliki signifikansi $0,218 > 0,05$, variabel pengendalian akuntansi memiliki signifikansi $0,999 > 0,05$, dan variabel sistem pelaporan memiliki signifikansi $0,702 > 0,05$. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.5.1.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya autokorelasi dalam analisis regresi. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi maka digunakan uji Durbin Watson. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan nilai Durbin Watson (DW) dengan tabel uji Durbin Watson (dU dan dL). Kriteria pengambilan keputusan dalam uji Durbin Watson adalah (Ghozali,2016). Adapun pengambilan keputusannya adalah sebagai berikut :

$0 < DW < dL$: Terjadi autokorelasi
$dL \leq DW \leq dU$: Tidak dapat disimpulkan
$dU < DW < 4-dU$: Tidak ada autokorelasi
$4-dU \leq DW \leq 4-dL$: Tidak dapat disimpulkan
$4-dL < d < 4$: Terjadi autokorelasi

Tabel 4.14.

Hsil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,859 ^a	,738	,725	2,015	1,957

Sumber : data primet dioalah, 2019

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel 4.10 menghasilkan nilai Durbin-Watson 1,957. Dengan $n = 85$ dan $k = 4$ dihasillkan nilai dU adalah sebesar 1,7470 dan nilai dL sebesar 1,5505. Hal tersebut menunjukkan bahwa $dU < DW < 4-dU$ yang ditunjukkan pada persamaan berikut $1,7470 < 1,957 < 2,253$ ($4-1,7470$). Sehingga penelitian ini tidak ada autokorelasi.

4.5.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Pada dasarnya analisis regresi adalah stdi mengenai ketergantungan variabel dependen dengan variabel dependen dengan tujuan untuk memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel yang diketahui (Ghozali, 2016). Analisis ini menguji seberapa pengaruh variabel kejelasan sasaran, kesulitan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan terhadap akuntanbilitas kinerja institusi pemerintah.

Berikut ini adalah hasil uji regresi linier berganda dalam penelitian ini :

Tabel 4.15.
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	27,635	3,585		7,708	,000
	Kejelasan Sasaran Anggaran	,211	,090	,238	2,351	,021
	Kesulitan Sasaran	,442	,118	,367	3,751	,000

Anggaran					
Pengendalian Akuntansi	,279	,084	,361	3,308	,001
Sistem Pelaporan	-,385	,268	-,091	-1,435	,155

Sumber : Data primer diolah 2019

Dari hasil analisis dengan program SPSS tersebut, maka dapat diketahui persamaan regresi dari penelitian ini. Adapun persamaan regresi linier yang terbentuk adalah :

$$Y : 27,635 + 0,211 X_1 + 0,442 X_2 + 0,279 X_3 - 0,385 X_4 + 3,585$$

Dari persamaan regresi linier berganda di atas maka dapat dianalisis sebagai berikut :

- Konstanta sebesar 27,635 dapat diartikan bahwa jika semua variabel independen (kejelasan sasaran anggaran, kesulitan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan) menunjukkan nilai nol, maka akuntabilitas kinerja institusi pemerintah akan bernilai 27,635.
- Koefisien regresi kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,211. Koefisien bertanda positif, berarti bahwa setiap kenaikan kejelasan sasaran anggaran akan diikuti dengan kenaikan akuntabilitas kinerja institusi pemerintah..
- Koefisien regresi kesulitan sasaran anggaran sebesar 0,442. Koefisien bertanda positif, berarti bahwa setiap kenaikan kesulitan sasaran anggaran akan diikuti dengan kenaikan akuntabilitas kinerja institusi pemerintah..
- Koefisien regresi pengendalian akuntansi sebesar 0,279. Koefisien bertanda positif, berarti bahwa setiap kenaikan pengendalian akuntansi akan diikuti dengan kenaikan akuntabilitas kinerja institusi pemerintah..

- e. Koefisien regresi sistem pelaporan sebesar 0,385. Koefisien bertanda negatif, berarti bahwa setiap kenaikan sistem pelaporan akan diikuti dengan penurunan akuntabilitas kinerja institusi pemerintah.

4.5.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi parameter individual pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual menerangkan variasi variabel dependen. Jika nilai probabilitas menunjukkan nilai $< 0,05$ dan $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima.

Tabel 4.16.
Hasil Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Coefficients ^a		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig
1	(Constant)	27,635	3,585		7,708	,000
	Kejelasan Sasaran Anggaran	,211	,090	,238	2,351	,021
	Kesulitan Sasaran Anggaran	,442	,118	,367	3,751	,000
	Pengendalian Akuntansi	,279	,084	,361	3,308	,001
	Sistem Pelaporan	-,385	,268	-,091	-1,435	,155

Sumber : Data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.16. menyatakan bahwa t_{hitung} untuk variabel kejelasan sasaran anggaran sebesar 2,351. t_{hitung} , variabel kesulitan sasaran anggaran adalah sebesar 3,751, t_{hitung} variabel pengendalian akuntansi adalah sebesar 3,308, dan t_{hitung} variabel sistem pelaporan adalah sebesar 1,435. Sedangkan melalui *level of significance* (taraf signifikansi) sebesar 0,05 dan df sebesar sebesar 81 ($df = n - k$) diperoleh t_{tabel} sebesar 1,98969.

- a. Variabel kejelasan sasaran anggaran memiliki $t_{hitung} 2,351 > t_{tabel} 1,98969$ dan probabilitas signifikansi $0,021 < 0,05$, sehingga variabel kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.
- b. Variabel kesulitan sasaran anggaran memiliki $t_{hitung} 3,751 > t_{tabel} 1,98969$ dan probabilitas signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga variabel kesulitan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.
- c. Variabel pengendalian akuntansi memiliki $t_{hitung} 3,308 > t_{tabel} 1,98969$ dan probabilitas signifikansi $0,000 < 0,05$, sehingga variabel pengendalian akuntansi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.
- d. Variabel sistem pelaporan memiliki $t_{hitung} 1,435 < t_{tabel} 1,98969$ dan probabilitas signifikansi $0,155 > 0,05$, sehingga variabel sistem pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Dengan demikian, hipotesis keempat dalam penelitian ini ditolak.

4.5.4. Uji *Goodness Of Fit* (Uji Kesesuaian Model)

Menurut Ghozali (2011), perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana

Ho ditolak). Sebaliknya perhitungan statistik disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Ho diterima.

Apabila signifikansi $> 0,05$ dan $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_a ditolak, namun jika signifikansi $< 0,05$ dan $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_a diterima.

Tabel 4.17.
Hasil Uji Kesesuaian Model

ANOVA^a

		Sum of		Mean		
Model		Squares	Df	Square	F	Sig.
1	Regression	916,622	4	229,156	56,411	,000 ^b
	Residual	324,978	80	4,062		
	Total	1241,600	84			

Sumber : data primer diolah 2019

Berdasarkan tabel 4.17. menyatakan bahwa F_{hitung} sebesar 52,198 dan probabilitas signifikansi 0,000. F_{tabel} untuk df $N_1 = 4$ dan $N_2 = 80$ diperoleh F_{tabel} sebesar 2,49. Hal tersebut menunjukkan bahwa $F_{hitung} = 56,411 > F_{tabel} = 2,49$ dan probabilitas signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan hasil ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa uji pada penelitian ini dapat dikatakan layak.

4.5.5. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi dilakukan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Adapun hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 4.16.

Tabel 4.18.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b

		R	Adjusted R	Std. Error of the
Model	R	Square	Square	Estimate
1	,859 ^a	,738	,725	2,015

Sumber : data primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,738 atau sebesar 73,8%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran, kesulitan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan dapat menjelaskan akuntabilitas kinerja institusi pemerintah sebesar 73,8%. Sedangkan sisanya 26,2% (100% - 73,8%) dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak disertakan dalam model penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien determinasi pada penelitian ini dalam kategori tinggi.

4.6. Pembahasan

4.6.1. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Koefisien regresi kejelasan sasaran anggaran sebesar 0,211. Koefisien bertanda positif, berarti bahwa setiap kenaikan kejelasan sasaran anggaran akan diikuti dengan kenaikan akuntabilitas kinerja institusi pemerintah.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kejelasan sasaran anggaran dan variabel lain bernilai 0, maka Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan akan mengalami penurunan sebesar 0,211 atau 21,1%. Jika kualitas anggaran suatu daerah rendah, maka kualitas fungsi-fungsi pemerintah cenderung lemah. Anggaran daerah harus menyajikan informasi mengenai kinerja yang ingin dicapai.

Kejelasan sasaran anggaran akan membantu pegawai untuk mencapai kinerja yang diharapkan, dimana dengan mengetahui sasaran anggaran yang jelas tingkat kinerja dapat tercapai.

Pencapaian ini akan berkaitan dengan motivasi, sebab dengan motivasi yang tinggi akan membantu pegawai mencapai kinerja yang diharapkan.

Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya, secara tidak langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja aparat. Selain itu dampak dari sasaran anggaran yang jelas adalah mempermudah penilaian akuntabilitas kinerja organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang sudah ditetapkan oleh organisasi sebelumnya.

Sasaran anggaran yang semakin jelas akan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam hal sasaran anggaran yang spesifik berorientasi pada hasil akhir. Jika sasaran anggaran yang di susun jelas instansi pemerintah daerah akan semakin teliti untuk menyusun anggaran dan hasilnya akan semakin membaik, sehingga kinerja instansi pemerintah daerah juga semakin baik.

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Anggi (2017) Reni dkk (2014) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Anggaran sebagai rencana kerja pemerintahan daerah merupakan desain teknis pelaksanaan strategi untuk mencapai tujuan daerah.

4.6.2. Pengaruh Kesulitan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Koefisien regresi kesulitan sasaran anggaran sebesar 0,442. Koefisien bertanda positif, berarti bahwa setiap kenaikan kesulitan sasaran anggaran akan diikuti dengan kenaikan akuntabilitas kinerja institusi pemerintah.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel kesulitan sasaran anggaran dan variabel lain bernilai 0, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan akan mengalami penurunan sebesar 0,442 atau 44,2%.

Dampak tingkat kesulitan anggaran terhadap kinerja manajerial dengan implikasi bahwa apabila manajer merasa anggaran yang ditetapkan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi dan tidak mudah dicapai maka hal tersebut menurunkan kinerja manajer karna merasa gagal dan frustrasi sebelum mencapainya.

Kesulitan sasaran anggaran mencakup berbagai kendala dan kesulitan yang dirasakan para aparat pemerintah daerah untuk mencapai tujuan anggaran pada unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Tingkat kesulitan anggaran memang dapat diantisipasi melalui proses penyusunan anggaran partisipatif.

Namun, penerapan anggaran partisipatif akan efektif meminimalisasi kesulitan pencapaian anggaran jika kondisinya normal sesuai dengan yang di prediksi. Perubahan /fluktuasi lingkungan akan menjadikan anggaran partisipatif kurang efektif.

Sedangkan apabila anggaran yang ditetapkan terlalu longgar dan mudah untuk dicapai maka manajer merasa tidak termotivasi dalam melaksanakannya karena untuk mencapainya tidak diperlukan usaha yang keras sehingga tidak menimbulkan suatu tantangan.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Reni dkk (2014) yang menyatakan bahwa kesulitan sasaran anggaran berpengaruh terhadap Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

4.6.3. Pengaruh Pengendalian Akuntansi Terhadap Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Koefisien regresi pengendalian akuntansi sebesar 0,279. Koefisien bertanda positif, berarti bahwa setiap kenaikan pengendalian akuntansi akan diikuti dengan kenaikan akuntabilitas kinerja institusi pemerintah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel pengendalian akuntansi dan variabel lain bernilai 0, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan akan mengalami penurunan sebesar 0,279 atau 27,9%.

Penggunaan sistem pengendalian diharapkan mampu mengestimasi biaya dan profitabilitas keberhasilan tertentu dan memilih alternatif terbaik dalam setiap kasus dan masalah sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Selain itu, dalam memahami akuntansi sebagai alat pengendalian perlu dibedakan penggunaan informasi akuntansi sebagai alat pengendalian keuangan (*financial control*) dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi (*organization control*).

Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Reni dkk (2014) dan Setiawan (2013) juga menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Sedangkan pengendalian akuntansi pada suatu organisasi adalah untuk menjamin bahwa langkah-langkah penyusunan dan pencatatan telah dilakukan dan tercipta integritas finansial dari aktivitas-aktivitas organisasi.

4.6.4. Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Koefisien regresi sistem pelaporan sebesar 0,385. Koefisien bertanda negatif, berarti bahwa setiap kenaikan sistem pelaporan akan diikuti dengan penurunan akuntabilitas kinerja institusi pemerintah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan variabel sistem pelaporan dan variabel lain bernilai 0, maka akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan akan mengalami penurunan sebesar 0,385 atau 38,5%.

Laporan umpan balik (*feedback*) diperlukan untuk mengukur aktivitas aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pada pelaksanaan suatu rencana atau waktu mengimplementasikan suatu anggaran. Sehingga manajemen dapat mengetahui hasil dari pelaksanaan rencana atau pencapaian sasaran anggaran yang ditetapkan.

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten dan dapat dipercaya

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Setiawan (2013) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan.

Namun penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ni Made dkk (2015) dan Zakiyudun dkk (2015) yang menyatakan bahwa sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajerial dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan.

4.6.5. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kesulitan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan uji kesesuaian, dihasilkan $F_{hitung} = 56,411 > F_{tabel} = 2,49$ dan probabilitas signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan hasil ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel independen (kejelasan sasaran, kesulitan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Yuliatni dkk (2014) menghasilkan penelitian bahwa kejelasan sasaran anggaran, kesulitan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan berpengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.